

**TEKNIK BIROKRASI PEMERINTAHAN DI DESA KALISONGO
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG
(Studi Pada Desa Kalisongo Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



DI SUSUN OLEH:

Yeheskiel Umbu Zogara

NIM: 2018210002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADENI
MALANG**

2022

Yehekiel Umbu Zogara, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang 2022

TEKNIK BIROKRASI PEMERINTAHAN DI DESA KALISONGO KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Email: yhekyzogara03@gmail.com

Dosen Pembimbing Utama

: Drs. Sugeng Rusmiwari, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping

: Firman Firdausi, S.H.,M.H

ABSTRAK

Anggapan administrasi yang diuraikan secara keseluruhan mengandung pengertian bahwa organisasi adalah semacam perkumpulan yang melakukan sistem kerja yang masih mengudara dengan peraturan dan pedoman, yang dipercayakan untuk menyelesaikan administrasi publik dan dilakukan secara tuntas. Administrasi di Indonesia Sejak periode perubahan dimulai, berbagai isu atau pemikiran telah diangkat oleh para ahli terkait dengan bagaimana mengakui administrasi yang baik, termasuk melalui perubahan regulasi. Upaya ini terus diselesaikan oleh pemerintah pusat dan negara bagian terdekat. Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengkaji prosedur administrasi pemerintahan di kota Kalisongo. Selain itu, konsentrat ini juga perlu memahami apa saja variabel pendukung dan unsur penekan terhadap kedisiplinan Pemkot Kalisongo.

Riset ini memakai riset kualitatif, dengan sumber informasi yaitu data primer dan data sekunder. Penentuan responden dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui interview, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik birokrasi pemerintahan di desa kalisongo tentang kedisiplinan pegawai desa sudah berjalan dengan lancar jika ditinjau dari kedisiplinan, kerja ketat pada peraturan. Pegawai desa sudah menjalankan tugas dengan baik pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sangat memuaskan dan sangat mendukung sehingga pemerintah memiliki sikap yang sangat mendukung sehingga kedisiplinan atau kerja yang ketat sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sedangkan faktor penghambat pelayanan surat secara online masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang media sosial seperti layanan surat secara online.

Kata Kunci: Teknik Birokrasi Pemerintahan, Atau Kedisiplinan Pemerintah, Desa Kalisongo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Alat Pertukaran Negara merupakan jawaban atas berbagai persoalan terkait penyelenggaraan ASN para pelaksana untuk melahirkan tenaga ASN yang cakap, memiliki sifat-sifat fundamental, cakap moral, terbebas dari mediasi politik, terbebas dari praktik kemerosotan, persekongkolan dan nepotisme. , dan mengakui adanya perubahan regulasi yang memiliki komitmen untuk mengawasi dan membina dirinya serta berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaksanaan kerangka legitimasi dalam penyelenggaraan perangkat umum negara.

Dalam Tata Cara Peraturan Pemerintah Daerah berbasis sistem mayoritas di negara-negara berkembang, orang-orang pada umumnya atau memberikan suara di daerah setempat sangat penting sehingga pernyataan demi kepentingan umum menjadi "bahasa" tetapi dapat tercermin di seluruh sebagai pekerja, pekerja, pembela dan penguatan daerah karena mereka (pekerja) "dibayar" oleh daerah, meskipun sebenarnya berapa angsuran tidak lagi tergantung pada pungutan yang mencerminkan kewajaran hidup secara wajar.

Kewenangan Umum Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk menjaga segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan bantuan pemerintahan umum, untuk mencerdaskan kehidupan negara, dan ikut serta melakukan permintaan dunia dalam rangka otonomi, kerukunan abadi. dan hak-hak sipil.

Jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah lugas dan bertanggung jawab, khususnya bagaimana membuat kerangka regulasi yang dapat melengkapi tatanannya dalam mewujudkan individu yang adil, sejahtera, dan sejahtera. merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh direktur pemerintah di semua tingkatan dari

tingkat fokus, teritorial, dan kota. Ini mengkaji pentingnya perubahan administratif untuk bekerja pada administrasi terbuka di legislatif lingkungan.

H. Inu Kencana dan Syafie 2014 Ilmu Pemerintahan, Ada beberapa hal yang diperhatikan oleh organisasi otoritas publik sehingga administrasi belum memiliki pilihan untuk lebih mengembangkan administrasi publik secara ideal, antara lain:

Konstruksi hierarkis dan teknik kerja yang boros

Investasi daerah masih rendah

Keterusterangan tidak bekerja

Alat kerja dan usaha yang menyedot tusukan

Sehingga untuk mengatasi masalah penyelenggaraan pemerintahan lingkungan harus diselesaikan perubahan-perubahan yang mengacu pada pengaturan perubahan regulasi yang sedang berjalan di tingkat publik. Dengan tujuan akhir untuk menawarkan jenis bantuan publik ke daerah setempat, negara bagian harus memiliki pedoman dan desain bantuan yang paling tidak jelas, dan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah oleh daerah setempat. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mensurvei kualitas yang diberikan dengan memanfaatkan catatan pemenuhan kebutuhan daerah, Klinik, dan lain-lain.

Administrasi jika diartikan secara keseluruhan mengandung pengertian bahwa administrasi adalah semacam perkumpulan yang melakukan strategi kerja yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan dan pedoman, yang dipercayakan untuk menyelesaikan administrasi publik dan dilakukan secara tuntas.

Wakhid, A.A. (2011). Kehadiran Ide Regulasi Max Weber dalam Perubahan Administratif di Indonesia Sejak periode perubahan, berbagai isu atau pertimbangan telah diangkat oleh para ahli terkait dengan bagaimana mengakui administrasi yang hebat, termasuk melalui perubahan regulasi. Upaya ini sedikit demi sedikit diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat (biasa dan lokal/kota). Secara

eksperimen, administrasi tidak dapat dibedakan dengan perangkat otoritas publik yang memiliki tiga aspek, khususnya asosiasi, SDM, dan dewan. Dalam pemerintahan, aspek-aspek ini dikenal sebagai organisasi, kepegawaian, dan eksekutif, yang merupakan komponen organisasi negara; mungkin aspek ini bisa ditambah dengan budaya mentalitas.

Ide organisasi hukum Max Weber yang bijaksana terwujud di Indonesia dengan berbagai manfaat dan kerugian yang terlihat dari cara berperilaku pemerintahan. Cara berperilaku yang diatur muncul ketika ada komunikasi antara atribut individu dan kualitas administratif; terutama dengan berbagai isu yang menciptakan dan kepolisian saat ini untuk patologi regulasi.

Dengan demikian untuk meninjau Teknik Birokrasi Pemerintahan Desa Kalisongo maka peneliti mengangkat judul penelitian “Teknik Birokrasi Pemerintahan Desa Kalisongo.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Teknik Birokrasi Pemerintahan Desa Kalisongo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Teknik Birokrasi Pemerintahan Desa Kalisongo?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Teknik Birokrasi Pemerintahan Desa Kalisongo.
2. Untuk mengidentifikasi apa faktor pendukung dan penghambat Teknik Birokrasi Pemerintahan Desa Kalisongo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- A. Sebagai pedoman untuk mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sekaligus bagaimana beradaptasi yang baik dalam pengenalan terhadap lingkungan kerja sebelum terjun ke dunia yang sesungguhnya.
- B. Peneliti ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- A. Sebagai pedoman pembelajaran tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi didunia kerja, dan kemudian
- B. berusaha mencari penyelesaiannya mempertimbangkan dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat berdasarkan ilmu yang di dapatkan di bangku kulia terhadap Teknik Birokrasi Pemerintahan Desa Kalisongo.
- C. Sebagai pedoman mempersiapkan dan profesionalisme dibidang Administrasi Negara yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi ujung tombak pemerintahan di dalam Teknik Birokrasi Pemerintahan Desa Kalisongo.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi, S., & Rusmiwari, S. 2016 Orientasi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 53
- Inu, Kencana. Syafiie, Haji. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kairupan, J. K 2015. Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik
- Syafiie, Inu kencana. 1991. *Pengantar ilmu Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Eresco dan Refika Aditama.
- Sugiyono. P. 2015. *Metode penelitian kombinasi mix methods*. Bandung: Alfabeta.
- Susanty, E. (2013). *Iklim Organisasi: Manfaatnya Bagi Organisasi, Semnas Fekon Optimisme Ekonomi Indonesia*, 229-239.
- Watunglawar, M.N. (2017). *Perwujudan Asas Netralisasi Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. *Fairness And Justice: jurnal ilmiah ilmu hukum*, 15(1), 70-88.
- Wakhid, A.A. (2011). *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(2), 126-146.
- Yunanto, Sutoro Eko, S. E. 2020. *Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada Administrasi*. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1 (1), 123.
- Zuherwan, J. (2002). *Kinerja Birokrasi Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjadara)*.
- Dwiyanto, A. 2021. *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*. UGM PRESS.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Pramuka, G. (2010). Masalah Birokrasi Sebagai Pelayanan Publik. *Masyarakat Kebudayaan & Politik*, 20(1), 23-34.

Ripley, R. B., & Franklin, G. A. 1996. *Policy Implementation And Bureaucracy*. Brook /Cole